

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian Kantor Pelayanan Pajak Pratama

Singosari

Kantor Pelayanan Pajak adalah unit kerja dari Direktorat Jenderal Pajak yang melaksanakan pelayanan kepada masyarakat di bidang perpajakan. Kantor Pelayanan Pajak adalah instansi vertikal Direktorat Jendral Pajak yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Kantor Wilayah.

KPP Pratama Singosari terbentuk pada tanggal 4 Desember 2007. Pada awalnya menempati bangunan yang beralamat di Jalan Raden Intan No. 10 Kelurahan Arjosari Kecamatan Blimbing Malang. Namun karena pertimbangan letak kantor yang tidak sesuai dengan wilayah kerja dan gedung yang sempit, maka pada bulan Agustus 2009 pindah ke Bangunan yang baru di Jalan Randuagung No. 12 Kelurahan Randuagung Kecamatan Singosari Kabupaten Malang.

1. Lokasi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Singosari dan Wilayah

Kerja

Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Singosari-Malang terletak di Jalan Randuagung No. 12 Kelurahan Randuagung Kecamatan Singosari Kabupaten Malang, Provinsi Jawa Timur. Secara umum Kantor Pelayanan Pajak Pratama Singosari memiliki batasan-batasan yang meliputi:

Sebelah timur : Jalan raya poros Surabaya

Sebelah Barat : Desa Randuangung
Sebelah Utara : STPP (Sekolah Tinggi Penyuluhan Pertanian)
Sebelah Selatan : SPBU Randuangung
Telepon : 481595,481596
Fax : 491082

Serta wilayah kerja KPP Pratama Singosari meliputi :

1. Kecamatan Lawang
2. Kecamatan Singosari
3. Kecamatan Karangploso
4. Kecamatan Dau
5. Kecamatan Pujon
6. Kecamatan Ngantang
7. Kecamatan Kasembon
8. Kecamatan Pakis
9. Kecamatan Jabung
10. Kecamatan Tumpang
11. Kecamatan Tajinan
12. Kecamatan Poncokusumo

Dengan modernisasi DJP maka unit-unit kerja yang tadinya melayani per jenis pajak seperti KPP (Paripurna) yang melayanai PPh dan PPN, KP PBB yang melayani PBB dan BPHTB, dan Kantor Pemeriksaan dan Penyidikan Pajak (Karikpa) yang menangani pemeriksaan dilebur menjadi satu unit kerja menjadi KPP Pratama (*STO-Small Tax Office*) yang

melayani semua jenis pajak. Hal ini mengakibatkan perubahan pada wilayah kerja unit kerja yang ada. Wilayah Kerja KPP Pratama Singosari terdiri dari 12 kecamatan yang berada di Kab Malang. Wilayah kerja KPP Pratama Singosari diuraikan dalam Tabel 5.

Tabel 5.

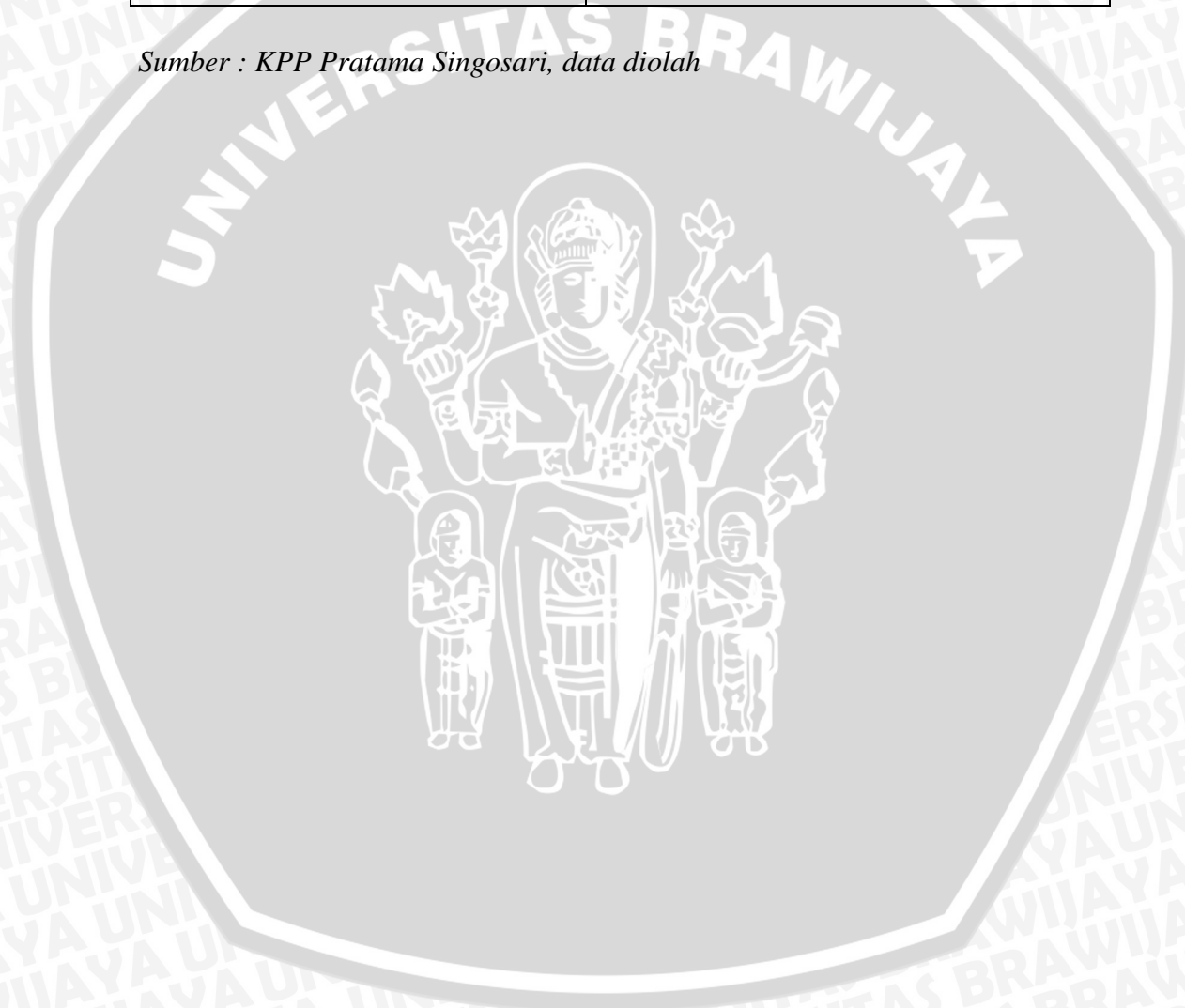
Wilayah Kerja Kantor Pelayanan Pajak Pratama Singosari

Kecamatan	Desa
Kecamatan Singosari	Langlang
	Toyomarto
	Wonorejo
	Candirenggo
	Randuagung
	Dengkol
	Tamanharjo
	Klampok
	Banjararum
	Baturetno
	Gunungrejo
	Losari
Kecamatan Pakis	Pagentan
	Purwoasri
	Watugede
	Tunjungtirto
	Ardimulyo
Kecamatan Pakis	Ampeldento
	Mangliawan
	Banjarejo
	Bunut Wetan
	Pakisjajar

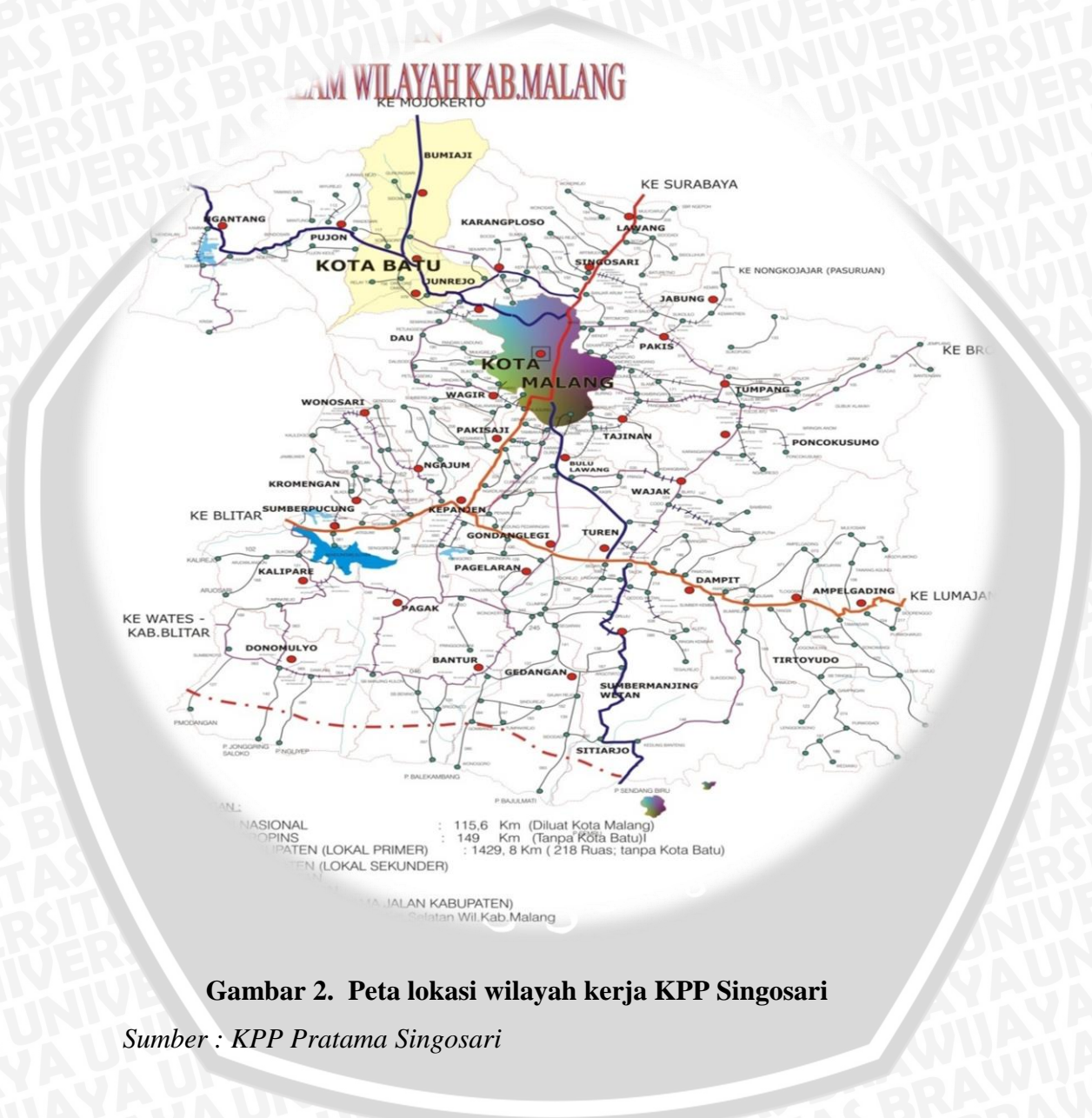
	Pakiskembar
	Sekarpuro
	Tirtomoyo
	Pucangsongo
	Sumberkradenan
	Asrikaton
	Saptorenggo
	Sumberpasir
Kecamatan Tumpang	Semua Desa
Kecamatan Poncokusumo	Semua Desa
Kecamatan Karangploso	Semua Desa
Kecamatan Jabung	Semua Desa
Kecamatan Tajinan	Semua Desa
Kecamatan Pujon	Semua Desa
Kecamatan Ngantang	Semua Desa
Kecamatan Kasembon	Semua Desa
Kecamatan Lawang	Kalirejo
	Lawang
	Ketindan
	Sidodadi
	Sumberngepoh
	Sidoluhur
	Srigading
	Mulyoarjo
	Bedali
	Sumberporong
Kecamatan Dau	Wonorejo
	Turirejo
	Mulyoagung
	Landungsari

Sumbersekar
Gadingkulon
Petungsewu
Kalisongo
Karangwidoro
Kucur
Tegalweru

Sumber : KPP Pratama Singosari, data diolah



2. Berikut ini gambaran peta lokasi wilayah kerja KPP Singosari:



Gambar 2. Peta lokasi wilayah kerja KPP Singosari

Sumber : KPP Pratama Singosari



3. Fungsi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Singosari

Berdasarkan pasal 59 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62/PMK.01/2009 tanggal 1 April 2009, KPP Pratama menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

- a. pengumpulan, pencarian dan pengolahan data, pengamatan potensi perpajakan, penyajian informasi perpajakan, pendataan objek dan subjek pajak, serta penilaian objek Pajak Bumi dan Bangunan;
- b. penetapan dan penerbitan produk hukum perpajakan;
- c. pengadministrasian dokumen dan berkas perpajakan, penerimaan dan pengolahan Surat Pemberitahuan, serta penerimaan surat lainnya;
- d. penyuluhan perpajakan;
- e. pelaksanaan registrasi WP;
- f. pelaksanaan ekstensifikasi;
- g. penatausahaan piutang pajak dan pelaksanaan penagihan pajak;
- h. pelaksanaan pemeriksaan pajak;
- i. pengawasan kepatuhan kewajiban perpajakan WP;
- j. pelaksanaan konsultasi perpajakan;
- k. pelaksanaan intensifikasi;
- l. pembetulan ketetapan pajak;
- m. pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

4. Visi dan Misi KPP PRATAMA SINGOSARI

Visi

Menjadi Institusi pemerintah yang menyelenggarakan sistem administrasi perpajakan modern yang efektif efisien dan dipercaya masyarakat dengan integritas dan profesionalisme yang tinggi.

Misi

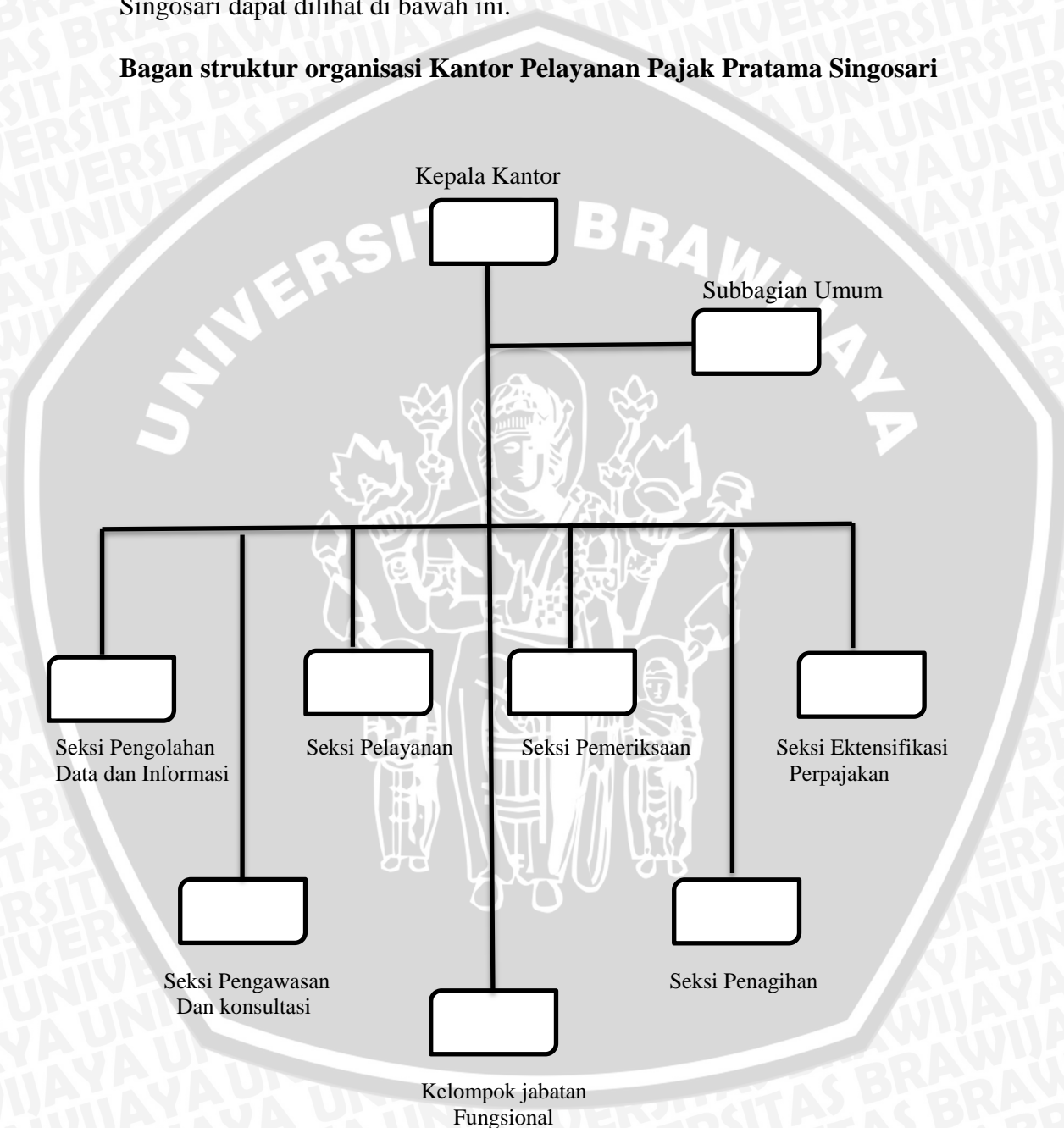
Menyelenggarakan fungsi administrasi perpajakan dengan menerapkan undang-undang perpajakan secara adil dalam rangka membiayai penyelenggaraan Negara demi kemakmuran rakyat.



5. Bidang-bidang Kegiatan

Gambaran susunan struktur organisasi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Singosari dapat dilihat di bawah ini.

Bagan struktur organisasi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Singosari



Gambar 3. Struktur Organisasi KPP Pratama Singosari

Sumber : KPP Pratama Singosari

6. Tugas Organisasi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Singosari

Struktur organisasi KPP Pratama Singosari dipimpin oleh satu orang Pejabat Eselon III yang jabatannya disebut Kepala Kantor, dimana kedudukannya membawahi satu subbagian dan delapan seksi yang dipimpin oleh masing-masing satu orang Pejabat Eselon IV, ditambah dengan satu kelompok Fungsional Pemeriksa Pajak. Adapun nama dan tugas masing-masing subbagian/seksi-seksi tersebut adalah sebagai berikut :

a. Kepala Kantor

Menugaskan Kepala Subbagian umum untuk menyusun konsep rencana kerja berdasarkan penerimaan tahun anggaran, menugaskan Kepala Bidang Pengolaan Data dan Informasi untuk melakukan rencana kerja Bidang Pengelolaan Data dan Informasi, menugaskan Kepala Seksi Bidang Pelayanan untuk melakukan rencana kerja Pelayanan, menugaskan Kepala Bidang Pemeriksaan untuk melakukan rencana kerja Bidang Pemeriksaan, menugaskan Kepala Bidang Pengawasan dan Konsultasi untuk melakukan rencana kerja Bidang Pengawasan dan Konsultasi, menugaskan Kepala Bidang Ekstensifikasi untuk melakukan rencana kerja Bidang Ekstensifikasi.

b. Subbagian Umum

Yang memiliki tugas pelayanan kesekretariatan dengan mengatur kegiatan kepegawaian, keuangan, rumah tangga dan perlengkapan untuk menunjang tugas kantor Pelayanan Pajak.

c. Seksi Pengolahan Data dan Informasi

Yang memiliki tugas melakukan pengumpulan, pengolahan data, pengamatan potensi perpajakan, penyajian informasi perpajakan, perekaman dokumen perpajakan, pelayanan dukungan teknis komputer, pemantauan aplikasi e-SPT dan e-Filing, serta penyiapan laporan kinerja.

d. Seksi Pelayanan

Yang memiliki tugas melakukan penetapan dan penerbitan produk hukum perpajakan, pengadministrasian dokumen dan berkas perpajakan, penerimaan dan pengolahan Surat Pemberitahuan, serta penerimaan surat lainnya, penyuluhan perpajakan, pelaksanaan registrasi WP, dan kerjasama perpajakan sesuai ketentuan yang berlaku.

e. Seksi Penagihan

Yang memiliki tugas penatausahaan piutang pajak, penundaan dan angsuran tunggakan pajak, penagihan aktif, usulan penghapusan piutang serta penyimpanan dokumen-dokumen penagihan sesuai ketentuan yang berlaku.

f. Seksi Pemeriksaan

Yang memiliki tugas melakukan penyusunan rencana pemeriksaan, pengawasan pelaksanaan aturan pemeriksaan, penerbitan dan penyaluran Surat Perintah Pemeriksaan Pajak serta administrasi pemeriksaan perpajakan lainnya.

g. Seksi Ekstensifikasi Perpajakan

Yang memiliki tugas melaksanakan pengamatan potensi perpajakan, pencarian data dari pihak ketiga, pendataan obyek dan subyek pajak, penilaian obyek pajak dalam rangka ekstensifikasi perpajakan sesuai ketentuan yang berlaku.

h. Seksi Pengawasan dan Konsultasi (Waskon)

Yang memiliki tugas melakukan pengawasan kepatuhan kewajiban perpajakan WP, bimbingan/himbauan kepada WP dan konsultasi teknis perpajakan, penyusunan profil WP, analisis kinerja WP, melakukan rekonsiliasi data WP dalam rangka melakukan intensifikasi, serta melakukan evaluasi hasil banding berdasarkan ketentuan yang berlaku.

i. Kelompok Jabatan Fungsional

Yang memiliki tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam pelaksanaan tugas sehari-hari KPP Pratama Singosari didukung oleh pegawai dengan jumlah sebanyak 68 orang. Para pegawai ditempatkan di subbagian/seksi berdasarkan jabatan dan kompetensi yang dimiliki. Rincian jumlah pegawai KPP Pratama Singosari berdasarkan jabatan dapat dilihat pada Tabel 6 dan Tabel 7.

**Tabel 6. Jumlah Pegawai KPP Pratama Singosari
Berdasarkan Jabatan**

NO.	JABATAN	JUMLAH (ORANG)
1	Eselon III / Kepala Kantor	1
2	Eselon IV / Kepala Seksi	8
3	Account Representative (AR) – di bawah Seksi Pengawasan dan Konsultasi	24
4	Fungsional Pemeriksa Pajak	3
5	Pelaksana	32
Jumlah		68

Sumber : KPP Pratama Singosari, diolah

7. Berikut ini merupakan daftar nama pegawai pajak sesuai jabatan.

Tabel 7. Daftar Nama Pegawai KPP Pratama Singosari

No.	Jabatan	NIP	Nama
1	Account Representative	197708041997031001	Ade Yusuf
2	Account Representative	197311061995111001	Adi Sutrisno
3	Account Representative	197902102000021001	Afrizal Ariyanto
4	Account Representative	060096386	Chakim Suaidi
5	Account Representative	198403032006021004	Doni Candra Setyawan
6	Account Representative	197610131999032002	Endang Setyawati
7	Account Representative	198111082002122001	Fitria Hamidi
8	Account Representative	197912182001121002	Gagak Pujo Priyanto
9	Account Representative	197710072002122001	Ganiahariani Hastuti
10	Account Representative	060104336	Icun Nurma Zidah
11	Account Representative	197303301992121001	Idi Aulia Shiddieq
12	Account Representative	197209121993012001	Laurentia Diah Saptarini
13	Account Representative	197610081999032001	Mirah Puspanita
14	Account Representative	197804031999031001	Pajar Suryanto
15	Account Representative	197501291995111002	Purwadi
16	Account Representative	196902111989122001	Ratri Wahyuningtyas
17	Account Representative	197108281992012001	Rositawati
18	Account Representative	197901252000011001	Setiyo Winarno

19	Account Representative	197804192000012001	Sofia Nur Izzaty
20	Account Representative	198508262009012003	Vina Satya Graha
21	Account Representative	198312212009011007	Wendra Rayudianto
22	Account Representative	197406201995111002	Wiwid Budiman
23	Account Representative	198406052006022001	Yunida Eka Hardiana
24	Account Representative	197502231997032001	Ummi Munfarikhah
25	Kepala Kantor	197011031996031001	Novrisyar
26	Kepala Seksi Ekstensifikasi Perpajakan	197407061996021001	Supeno
27	Kepala Seksi Pelayanan	197603251996022001	Lutfiana
28	Kepala Seksi Penagihan	197810112000011001	Mohamad Apip
29	Kepala Seksi Pengawasan dan Konsultasi I	195708161980092001	Wahyuni Endang Prihatin
30	Kepala Seksi Pengawasan dan Konsultasi II	196902231995032001	Janita Sunarsasi
31	Kepala Seksi Pengawasan dan Konsultasi III	197210281998031002	Bambang Hariyono
32	Kepala Seksi Pengolahan Data dan Informasi	197506011995032001	Aminatus Sholihah
33	Kepala Subbagian Umum	196808201995032001	Ida Heryanie
34	Pelaksana	196201291985032001	Ade Ruswina Harahap
35	Pelaksana	196404011998031001	Anang Subarno
36	Pelaksana	196508071985032001	Andri Astuti
37	Pelaksana	198711122008122002	Cyndie Drie Gatra Ardi Gerda
38	Pelaksana	198212172003122003	Ditaningtyas Aryani
39	Pelaksana	198802102009122003	Fembriana Herdian Purnamasari
40	Pelaksana	198401052003121002	Hari Isnawan
41	Pelaksana	060106270	Indri Wahyuastuti
42	Pelaksana	198504092004121002	Irwansyah
43	Pelaksana	197912012000121003	Iwan Effendhi
44	Pelaksana	198405072003122001	Lilik Setyaningrum
45	Pelaksana	198405042004121001	Linggar Bayu Tranggono
46	Pelaksana	197610171997032001	Mamik Kristiani
47	Pelaksana	198503232004122001	Mia Furi Anggraeni
48	Pelaksana	198807132010121002	Mukhlis Fajar Cahyana
49	Pelaksana	197903172000021001	Ngatikul Ruston
50	Pelaksana	196510201985031003	Puguh Handoko
51	Pelaksana	198610202008122002	Rischa Primaning Tiyas

52	Pelaksana	198407042003121002	Riza Mahendra
53	Pelaksana	198111022001121001	Sandi Wibisono
54	Pelaksana	195905271981031002	Sri Bandi
55	Pelaksana	198408282004122001	Sri Wahyuni
56	Pelaksana	195910051982101001	Sugiono
57	Pelaksana	195708311979101001	Suhartono
58	Pelaksana	198507072003122002	Supinatun
59	Pelaksana	197103061998031002	Suratna
60	Pelaksana	198201182003121002	Suwisman Ariyanto
61	Pelaksana	198007182000122001	Tri Yuliani
62	Pelaksana	198212262002121001	Yudi Santoso
63	Pelaksana	197506171996031001	Yudi Wicaksono
64	Pelaksana	060105100	Yusi Rihadini Susilo Putri
65	Pemeriksa Pajak Muda	197105201993022001	Hartini Sulistyaningsih
66	Pemeriksa Pajak Pertama	197907302000121002	Anis Wahyu Hermawan
67	Pemeriksa Pajak Pertama	197812312000121002	M. Zainul Muttaqin
68	Penilai PBB Muda	197209031992121001	Fajar Puja Sasmita

Sumber : KPP Pratama Singosari, diolah

B. PENYAJIAN DATA

Penyajian data penelitian pada skripsi ini adalah hasil penelitian riset dalam mengumpulkan data primer melalui kuesioner/angket yang diberikan kepada responden dan data sekunder bisa berupa dokumen, *hardcopy*, *softcopy*, gambar, foto, peraturan, kebijakan dan lain-lain. Setelah dilakukan proses pengumpulan data, riset baru bisa menyajikan data hasil penelitian.

1. Penyajian Data Primer berupa Kuesioner/Angket

Riset dengan menyebarkan kuesioner terhadap obyek yang diteliti yaitu dengan menyebarkan kuesioner kepada 50 responden yang merupakan wajib pajak orang pribadi yang sedang melakukan

kegiatan lapor bulanan ke Kantor Pelayanan Pajak Pratama Singosari.

Pada Pengumpulan data, terdapat 5 variabel terdiri dari 4 variabel bebas dan 1 variabel terikat. Masing-masing variabel terdapat 7 pertanyaan yang harus dijawab oleh responden. Dari data kuesioner yang sudah saya peroleh, dapat dilihat pada tabel 8. Sebagai berikut:

Tabel 8. Identitas Responden

No	Identitas Responden				
	Umur	JK	Jabatan	Pend. Akhir	Lama Kerja
1	56	L	Guru Agama	S1	22
2	26	L	Pegawai	S1	3
3	25	P	Karyawan	S1	3
4	35	P	Adm	S1	9
5	30	P	Staff Keuangan	S1	5
6	30	P	Staff Adm	S1	3
7	25	P	Staff Keuangan	D2	5
8	36	L	Staff	S1	10
9	31	P	Karyawati	S1	10
10	24	P	Karyawan	SMK	7
11	36	L	Umum	S1	12
12	42	L	Staff	S1	3
13	22	P	Staff Adm	SMK	3
14	40	P	Adm	S1	15
15	34	L	Karyawan	SMK	13
16	20	L	Karyawan	SMK	2
17	27	L	Marketing	SMA	1
18	34	L	Karyawan	STM	15
19	25	L	Adm	S1	3
20	23	L	Adm	SMA	1
21	40	P	Staff Adm	D1	19
22	25	L	Karyawan	S1	3
23	19	L	Karyawan	D1	1
24	25	L	Pegawai	SMA	2

25	50	L	Karyawan	S1	5
26	30	P	Karyawan	SMA	5
27	36	L	Karyawan	S1	7
28	35	P	Karyawan	SMA	12
29	19	P	Staff Notaris	D1	1
30	34	P	Staff Adm	SMK	15
31	29	L	PNS	D3	9
32	27	P	PNS	D3	5
33	29	L	PNS	D1	10
34	22	L	Tukang Ketik	D3	1
35	48	L	PNS	SMA	16
36	45	P	Swasta	S1	15
37	30	L	Karyawan	S1	9
38	57	L	PNS	S1	30
39	45	L	TNI-AL	SMA	25
40	29	L	Swasta	SMK	2
41	34	L	Guru	S1	3
42	31	L	Swasta	S1	10
43	30	P	Konsultan	S1	3
44	27	L	Swasta	S1	3
45	57	L	Swasta	STM	31
46	32	L	Swasta	D3	8
47	33	L	Swasta	S1	10
48	20	P	Guru	SMK	2
49	27	P	Swasta	S1	6
50	33	P	Swasta	S1	7

Sumber: FNI Statistics

2. Penyajian Data Sekunder berupa Dokumen

Data sekunder yang saya peroleh dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama Singosari berupa data dapat dilihat pada tabel 9. sebagai berikut:

Tabel 9. Jumlah Data Wajib Pajak Orang Pribadi

Tahun	Wajib Pajak Orang Pribadi Terdaftar	Wajib Pajak Orang Pribadi Efektif	Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Menyampaikan SPT Tahunan
2010	56.606	53.851	38.476
2011	64.274	60.690	26.657
2012	67.427	63.841	28.977

Sumber: Seksi Pengolahan Data dan Informasi di KPP Pratama Singosari

Wajib Pajak Terdaftar adalah Wajib Pajak Orang Pribadi dan Badan yang terdaftar dalam administrasi Direktorat Jenderal Pajak sampai dengan tanggal 31 Desember. Dalam artian, wajib pajak terdaftar di sini wajib pajak yang sudah memiliki NPWP dan wajib memenuhi kewajiban membayar pajak. Sedangkan Wajib Pajak Efektif adalah Wajib Pajak yang memenuhi kewajiban perpajakannya berupa memenuhi kewajiban menyampaikan SPT masa dan atau Tahunan sebagaimana mestinya. Penjelasan Wajib pajak efektif, dimana wajib pajak tersebut masih aktif dan masih memenuhi kewajiban perpajakannya. Disini dapat dilihat terjadi peningkatan setiap tahunnya pada tahun 2010-2012 pada kolom Wajib Pajak Orang Pribadi terdaftar dan Wajib Pajak Orang

Pribadi yang Efektif. Sedangkan Untuk Wajib Pajak Orang Pribadi yang Menyampaikan SPT Tahunan terdapat ketidak stabilan dari tahun 2010-2012.

Data selanjutnya yang saya peroleh dari KPP Pratama Singosari berupa tabel Penerimaan KPP Pratam Singosari Per Jenis pajak dari 1 Januari – 31 Desember 2010 - 2012, dapat dilihat pada tabel 10. sebagai berikut:

Tabel 10. Penerimaan KPP Pratama Singosari Per Jenis Pajak 1 Januari – 31 Desember 2010

No.	Kode	Jenis Pajak	Penerimaan (Rp)
1	411111	PPh Minyak Bumi	6.382.700
2	411112	PPh Gas Alam	1.081.845
3	411121	PPh Pasal 21	40.632.449.164
4	411122	PPh Pasal 22	2.242.946.201
5	411123	PPh Pasal 22 Impor	2.513.239.104
6	411124	PPh Pasal 23	8.164.998.133
7	411125	PPh Pasal 25/29 Orang Pribadi	2.006.496.247
8	411126	PPh Pasal 25/29 Badan	18.353.916.898
9	411127	PPh Pasal 26	1.971.335.985
10	411128	PPh Final	21.528.371.079
11	411129	PPh Non Migas Lainnya	627.624
12	411211	PPN Dalam Negeri	172.623.032.602
13	411212	PPN Impor	9.188.661.290
14	411219	PPN Lainnya	8.277.764
15	411221	PPnBM Dalam Negeri	2.322.254
16	411222	PPnBM Impor	555.699.012
17	411612	Penjualan Benda Meterai	1.767.900.000
18	411621	Bunga/Denda Penagihan PPh	488.725
19	411622	Bunga/Denda Penagihan PPN	9.970.440
20		PBB	36.430.640.000
Total			318.008.837.067

**Tabel 11. Penerimaan KPP Pratama Singosari Per Jenis Pajak 1
Januari – 31 Desember 2011**

No.	Kode	Jenis Pajak	Penerimaan (Rp)
1	411112	PPh Gas Alam	1.389.416
2	411119	PPh Migas Lainnya	133.650
3	411121	PPh Pasal 21	57.846.295.454
4	411122	PPh Pasal 22	2.538.584.479
5	411123	PPh Pasal 22 Impor	2.850.607.909
6	411124	PPh Pasal 23	12.514.505.615
7	411125	PPh Pasal 25/29 Orang Pribadi	2.291.085.999
8	411126	PPh Pasal 25/29 Badan	47.727.838.763
9	411127	PPh Pasal 26	5.645.361.568
10	411128	PPh Final	35.400.402.325
11	411129	PPh Non Migas Lainnya	733.212
12	411211	PPN Dalam Negeri	197.176.001.035
13	411212	PPN Impor	3.594.417.551
14	411219	PPN Lainnya	13.210.910
15	411221	PPnBM Dalam Negeri	24.867.328
16	411222	PPnBM Impor	9.836.881
17	411621	Bunga/Denda Penagihan PPh	124.481
18	411622	Bunga/Denda Penagihan PPN	4.714.600
19		PBB	22.283.751.036
Total			389.923.862.212

**Tabel 12. Penerimaan KPP Pratama Singosari Per Jenis Pajak 1
Januari – 31 Desember 2012**

No.	Kode	Jenis Pajak	Penerimaan (Rp)
1	411112	PPh Gas Alam	4.620.863
2	411119	PPh Migas Lainnya	75.000
3	411121	PPh Pasal 21	54.983.005.934
4	411122	PPh Pasal 22	2.085.539.392
5	411123	PPh Pasal 22 Impor	2.160.904.476
6	411124	PPh Pasal 23	18.905.815.086
7	411125	PPh Pasal 25/29 Orang Pribadi	2.623.181.754
8	411126	PPh Pasal 25/29 Badan	11.399.636.196
9	411127	PPh Pasal 26	7.157.471.973
10	411128	PPh Final	44.818.612.108
11	411129	PPh Non Migas Lainnya	333.874
12	411211	PPN Dalam Negeri	175.796.630.925

13	411212	PPN Impor	5.992.405.873
14	411219	PPN Lainnya	20.956.372
15	411221	PPnBM Dalam Negeri	5.951.227
16	411222	PPnBM Impor	117.841.236
17	411229	PPnBM Lainnya	145.000
18		PBB	25.197.825.172
Total			351.270.952.461

Sumber: Seksi Pengolahan Data dan Informasi di KPP Pratama Singosari

C. ANALISIS DAN INTERPRETASI

1. Uji Validitas dan Reliabilitas Instrumen

Pengujian instrumen dilakukan dengan tujuan untuk menguji apakah instrumen yang digunakan dalam penelitian ini memenuhi syarat-syarat alat ukur yang baik atau sesuai dengan standar metode penelitian. Mengingat pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan kuesioner, maka keseriusan atau kesungguhan responden dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan merupakan unsur penting dalam penelitian. Keabsahan atau kesahihan data hasil penelitian sosial sangat ditentukan oleh instrumen yang digunakan.

Instrumen dikatakan baik apabila memenuhi tiga persyaratan utama yaitu: (1) valid atau sahih; (2) reliabel atau andal; dan (3) praktis. Bilamana alat ukur yang digunakan tidak valid atau tidak dapat dipercaya dan tidak andal atau reliabel, maka hasil penelitian tidak akan menggambarkan keadaan yang sesungguhnya. Oleh karena itu, untuk menguji kuesioner sebagai instrumen penelitian maka digunakan uji validitas (*test of validity*) dan uji reliabilitas (*test of reliability*). Pada uji validitas dan reliabilitas, peneliti menggunakan 30 orang responden dari populasi yang diamati.

Tabel 13. Hasil Pengujian Validitas dan Reliabilitas Instrumen

Indikator	r hitung	Signifikan si	Keterang an	Cronbach's Alpha	Keterangan
Kesadaran Membayar Pajak (X1)					
X1.1	0.738	0.000	Valid	0.651	Reliabel
X1.2	0.741	0.000	Valid		
X1.3	0.756	0.000	Valid		
X1.4	0.396	0.030	Valid		
X1.5	0.446	0.013	Valid		
X1.6	0.440	0.015	Valid		
X1.7	0.424	0.020	Valid		
Pelayanan Fiskus (X2)					
X2.1	0.843	0.000	Valid	0.760	Reliabel
X2.2	0.440	0.015	Valid		
X2.3	0.598	0.000	Valid		
X2.4	0.559	0.001	Valid		
X2.5	0.789	0.000	Valid		
X2.6	0.568	0.001	Valid		
X2.7	0.670	0.000	Valid		
Pengetahuan & Pemahaman Tentang Peraturan Perpajakan (X3)					
X3.1	0.541	0.002	Valid	0.719	Reliabel
X3.2	0.643	0.000	Valid		
X3.3	0.747	0.000	Valid		
X3.4	0.752	0.000	Valid		
X3.5	0.623	0.000	Valid		
X3.6	0.451	0.012	Valid		
X3.7	0.536	0.002	Valid		
Persepsi atas efektifitas Sistem Perpajakan (X4)					
X4.1	0.461	0.010	Valid	0.681	Reliabel
X4.2	0.675	0.000	Valid		
X4.3	0.725	0.000	Valid		
X4.4	0.502	0.005	Valid		
X4.5	0.453	0.012	Valid		
X4.6	0.584	0.001	Valid		
X4.7	0.785	0.000	Valid		
Kemauan Membayar Pajak (Y)					
Y.1	0.460	0.011	Valid	0.726	Reliabel
Y.2	0.602	0.000	Valid		
Y.3	0.541	0.002	Valid		
Y.4	0.652	0.000	Valid		

Y.5	0.635	0.000	Valid		
Y.6	0.754	0.000	Valid		
Y.7	0.653	0.000	Valid		

Sumber: FNI Statistics

Hasil uji validitas instrumen pada butir pertanyaan variabel X1, X2, X3, X4, dan Y yang masing-masing terdiri dari 7 butir pertanyaan didapatkan nilai koefisien Korelasi Product Moment (r hitung) yang valid antara 0,396 hingga 0,843. Dengan menggunakan ketentuan nilai koefisien korelasi lebih besar dari 0,361 menunjukkan bahwa keputusan H_0 ditolak dan disimpulkan bahwa butir pertanyaan yang digunakan adalah valid dan dapat digunakan pada proses analisis selanjutnya.

Hasil uji reliabilitas instrumen pada butir pertanyaan variabel X1, X2, X3, X4, dan Y yang masing-masing terdiri dari 7 butir pertanyaan didapatkan nilai *Cronbach's Alpha* variabel X1 sebesar 0,651, variabel X2 sebesar 0,760, variabel X3 sebesar 0,719, variabel X4 sebesar 0,681, dan variabel Y sebesar 0,726. Dari hasil tersebut dapat diambil keputusan menolak H_0 dan disimpulkan bahwa butir pertanyaan adalah reliabel karena nilai *Cronbach's Alpha* lebih besar dari 0,600 atau termasuk dalam kriteria "sangat tinggi" dalam Indeks Koefisien Reliabilitas yang artinya bahwa butir pertanyaan variabel X1, X2, X3, X4, dan Y memiliki kehandalan yang sangat tinggi dalam mengukur jawaban responden.

2. Deskripsi Karakteristik Umum Responden

Karakteristik umum responden yang diamati dalam penelitian ini antara lain umur, jenis kelamin, pekerjaan, pendidikan, dan lama kerja. Hasil pengujian disajikan sebagai berikut.

Tabel 14. Hasil Distribusi Frekuensi Karakteristik Umum Responden

Karakteristik	Frekuensi (f)	Prosentase (%)
Umur		
< 30 tahun	26	52.0
31 - 40 tahun	16	32.0
41 - 50 tahun	5	10.0
> 50 tahun	3	6.0
Jumlah	50	100.0
Jenis Kelamin		
Laki-laki	30	60.0
Perempuan	20	40.0
Jumlah	50	100.0
Pekerjaan		
PNS	8	16.0
Swasta	41	82.0
TNI / Polri	1	2.0
Jumlah	50	100.0
Pendidikan		
SMA sederajat	16	32.0
Diploma	9	18.0
Sarjana	25	50.0
Jumlah	50	100.0
Lama Kerja		
< 5 tahun	24	48.0
6 - 10 tahun	13	26.0
11 - 15 tahun	7	14.0
16 - 20 tahun	2	4.0
> 20 tahun	4	8.0
Total Responden	50	100.0

Sumber: FNI Statistics

Pada tabel 14. dapat diketahui bahwa mayoritas responden yang diamati berumur kurang dari 30 tahun ($26/50 \times 100\% = 52,0\%$) dan sisanya berumur antara 31 – 40 tahun ($16/50 \times 100\% = 32,0\%$), antara 41 – 50 tahun ($5/50 \times 100\% = 10,0\%$), dan lebih dari 50 tahun ($3/50 \times 100\% = 6,0\%$). Dari segi jenis kelamin, jumlah responden laki-laki ($30/50 \times 100\% = 60,0\%$) lebih banyak daripada responden perempuan ($20/50 \times 100\% = 40,0\%$). Dari segi pekerjaan, ($41/50 \times 100\% = 82,0\%$) responden bekerja di bidang Swasta, ($8/50 \times 100\% = 16,0\%$) bekerja di bidang PNS, dan ($1/50 \times 100\% = 2,0\%$) bekerja di bidang TNI / Polri. Berdasarkan pendidikan terakhir, ($25/50 \times 100\% = 50,0\%$) responden mempunyai pendidikan Sarjana, ($16/50 \times 100\% = 32,0\%$) mempunyai pendidikan SMA sederajat, dan ($9/50 \times 100\% = 18,0\%$) berpendidikan Diploma. Berdasarkan lama kerja, mayoritas responden bekerja kurang dari 5 tahun ($24/50 \times 100\% = 48,0\%$), dan sisanya bekerja antara 6 – 10 tahun ($13/50 \times 100\% = 26,0\%$), bekerja antara 11 – 15 tahun ($7/50 \times 100\% = 14,0\%$), bekerja antara 16 – 20 tahun ($2/50 \times 100\% = 4,0\%$), dan bekerja lebih dari 20 tahun ($4/50 \times 100\% = 8,0\%$).

Dari tingkat umur prosentasenya 52% responden berumur < 30 tahun. Kejadian ini menunjukkan banyak responden-responden muda atau wajib pajak masih muda yang sudah memiliki pekerjaan yang memenuhi kriteria perpajakan dan memiliki kewajiban untuk membayar pajak.

Dari tingkat pekerjaan prosentasenya 82% responden memiliki pekerjaan swasta. Hal ini menunjukkan, bahwa pekerjaan swasta lebih menguasai daerah singosari tempat mereka kerja karena di sekitar daerah singosari terdapat banyak perusahaan serta pabrik yang memiliki banyak karyawan swasta.

Dari tingkat pendidikan prosentasenya 50% responden memiliki pendidikan Sarjana. Hal ini memberikan indikasi, bahwa tingkat pendidikan dapat mempengaruhi pemahaman dan pengetahuan tentang pajak. Mengingat dengan memiliki pendidikan yang lebih tinggi, maka akan mempengaruhi cara pandang, cara berfikir, dan cara bersikap.

Dari tingkat lama kerja prosentasenya 48% responden memiliki lama kerja < 5 tahun. Fenomena ini menunjukkan banyak pekerja-pekerja atau karyawan-karyawan baru bermunculan di Singosari daripada pekerja-pekerja atau karyawan-karyawan yang lama kerjanya > 5 tahun.

Dari prosentase di atas menjelaskan untuk mengukur seberapa besar frekuensi karakteristik dari responden yang dibagi menjadi beberapa macam karakteristik, sehingga dari prosentase beberapa macam karakteristik responden yang sudah dibagi-bagi beberapa macam itu, dapat diambil kesimpulan mana karakteristik responden yang memiliki prosentase lebih besar dan memiliki indikasi lebih besar.

3. Distribusi Jawaban Responden

Pada bagian ini diketahui distribusi frekuensi jawaban masing-masing pertanyaan yang diajukan pada responden. Terdapat 5 jawaban untuk tiap pertanyaan, yaitu Sangat Tidak Setuju (STS), Tidak Setuju (TS), Netral (N), Setuju (S), dan Sangat Setuju (SS). Hasil pengujian disajikan pada tabel 15. sebagai berikut.

Tabel 15. Hasil Distribusi Jawaban Responden Variabel Kesadaran Membayar Pajak (X1)

Indikator	STS		TS		N		S		SS		Rata-rata
	Frek	%	Frek	%	Frek	%	Frek	%	Frek	%	
X1.1	1	2.0	0	0.0	2	4.0	21	42.0	26	52.0	4.42
X1.2	1	2.0	3	6.0	6	12.0	33	66.0	7	14.0	3.84
X1.3	1	2.0	10	20.0	7	14.0	20	40.0	12	24.0	3.64
X1.4	0	0.0	1	2.0	7	14.0	32	64.0	10	20.0	4.02
X1.5	1	2.0	5	10.0	9	18.0	20	40.0	15	30.0	3.86
X1.6	0	0.0	1	2.0	6	12.0	29	58.0	14	28.0	4.12
X1.7	0	0.0	2	4.0	1	2.0	28	56.0	19	38.0	4.28

Sumber: FNI Statistics

Keterangan:

X1.1 : Pajak merupakan bentuk partisipasi dari salah satu penerimaan negara yang memiliki kontribusi besar dalam menunjang pembangunan negara.

X1.2 : Penundaan pembayaran pajak yang tidak tepat waktu yang dilakukan wajib pajak akan menimbulkan pengurangan beban pajak yang sangat merugikan negara.

X1.3 : Pajak telah ditetapkan sesuai dengan Undang-undang yang bersifat memaksa untuk melakukan kewajiban perpajakannya.

X1.4 : Wajib pajak yang membayar pajaknya yang tidak sesuai dengan yang seharusnya dibayarkan akan merugikan Negara.

X1.5 : Manfaat dari pemungutan pajak sesungguhnya juga dirasakan oleh mereka sendiri tapi tidak secara langsung dinikmati oleh wajib pajak.

X1.6 : Dari penerimaan pembayaran pajak akan terbentuk rencana untuk kemajuan kesejahteraan rakyat.

X1.7 : Untuk Pemahaman akan peraturan perpajakan dapat dilakukan melalui sosialisasi yang dilakukan oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama.

Hasil pengujian distribusi frekuensi jawaban variabel Kesadaran Membayar Pajak (X1) yang terdiri dari 7 butir pertanyaan didapatkan hasil bahwa mayoritas responden menjawab Setuju (S) dan Sangat Setuju (SS) pada butir pertanyaan yang diajukan. Hal ini menunjukkan bahwa mayoritas responden menyetujui butir pertanyaan pada variabel tersebut. Rata-rata tertinggi terdapat pada butir pertanyaan X1.1 yaitu Pajak merupakan bentuk partisipasi dari salah satu penerimaan negara yang memiliki kontribusi besar dalam menunjang pembangunan negara, menunjukkan bahwa pertanyaan tersebut dinilai lebih oleh responden dalam menjelaskan variabel Kesadaran Membayar Pajak (X1).

Tabel 16. Hasil Distribusi Jawaban Responden Variabel Pelayanan Fiskus (X2)

Indikator	STS		TS		N		S		SS		Rata-rata
	Frek	%	Frek	%	Frek	%	Frek	%	Frek	%	
X2.1	1	2.0	1	2.0	6	12.0	20	40.0	22	44.0	4.22
X2.2	0	0.0	0	0.0	9	18.0	28	56.0	13	26.0	4.08
X2.3	1	2.0	1	2.0	6	12.0	27	54.0	15	30.0	4.08
X2.4	0	0.0	0	0.0	4	8.0	21	42.0	25	50.0	4.42
X2.5	0	0.0	0	0.0	6	12.0	31	62.0	13	26.0	4.14
X2.6	0	0.0	0	0.0	4	8.0	32	64.0	14	28.0	4.20
X2.7	0	0.0	2	4.0	6	12.0	28	56.0	14	28.0	4.08

Sumber: FNI Statistics

Keterangan:

X2.1 : Prosedur administrasi pajak dibuat sederhana agar mudah dipahami oleh semua wajib pajak.

X2.2 : Fiskus dengan sukarela membantu kesulitan wajib pajaknya serta bersedia memberikan penyuluhan.

X2.3 : Fiskus diharapkan memiliki kompetensi dalam *skill, knowledge*, dan *experience* dalam hal kebijakan perpajakan.

X2.4 : Fiskus memiliki etika baik, ramah saat melayani untuk memberikan penjelasan, agar wajib pajak benar-benar paham sesuai yang diharapkan atau diinginkan.

X2.5 : Fiskus memberikan pelayanan dengan cepat serta tangkas untuk membantu kesulitan wajib pajak.

X2.6 : Fiskus senantiasa menjaga kerapian dalam berpenampilan saat melayani Wajib Pajak.

X2.7 : Fiskus (aparatur pajak) mampu bekerja secara transparan terhadap Wajib pajak.

Hasil pengujian distribusi frekuensi jawaban variabel Pelayanan Fiskus (X2) yang terdiri dari 7 butir pertanyaan didapatkan hasil bahwa mayoritas responden menjawab Setuju (S) dan Sangat Setuju (SS) pada butir pertanyaan yang diajukan. Hal ini menunjukkan bahwa mayoritas responden menyetujui butir pertanyaan pada variabel tersebut. Rata-rata tertinggi terdapat pada butir pertanyaan X2.4 yaitu Fiskus memiliki etika baik, ramah saat melayani untuk memberikan penjelasan, agar wajib pajak benar-benar paham sesuai yang diharapkan atau diinginkan, menunjukkan bahwa pertanyaan tersebut dinilai lebih oleh responden dalam menjelaskan variabel Pelayanan Fiskus (X2).

Tabel 17. Hasil Distribusi Jawaban Responden Variabel Pengetahuan dan Pemahaman Tentang Peraturan Perpajakan (X3)

Indikator	STS		TS		N		S		SS		Rata-rata
	Frek	%	Frek	%	Frek	%	Frek	%	Frek	%	
X3.1	0	0.0	5	10.0	7	14.0	28	56.0	10	20.0	3.86
X3.2	0	0.0	3	6.0	10	20.0	27	54.0	10	20.0	3.88
X3.3	2	4.0	4	8.0	10	20.0	27	54.0	7	14.0	3.66
X3.4	1	2.0	1	2.0	11	22.0	29	58.0	8	16.0	3.84
X3.5	0	0.0	1	2.0	1	2.0	37	74.0	11	22.0	4.16
X3.6	0	0.0	2	4.0	7	14.0	33	66.0	8	16.0	3.94
X3.7	0	0.0	5	10.0	15	30.0	23	46.0	7	14.0	3.64

Sumber: FNI Statistics

Keterangan:

X3.1 : Pendaftaran NPWP bagi setiap wajib pajak yang memiliki penghasilan harus memenuhi kriteria untuk membuat NPWP.

X3.2 : Wajib pajak memiliki pengetahuan dan pemahaman tentang hak dan kewajiban wajib pajak.

X3.3 : Pengetahuan dan pemahaman tentang sanksi jika melakukan pelanggaran perpajakan yang dilakukan oleh wajib pajak.

X3.4 : Wajib pajak memiliki Pengetahuan dan pemahaman mengenai PTKP, PKP dan tarif pajak.

X3.5 : Pengetahuan dan pemahaman peraturan pajak dapat diberikan kepada wajib pajak melalui sosialisasi.

X3.6 : Pengetahuan bahwa jika wajib pajak yang sudah memiliki NPWP mempunyai kewajiban untuk membayar pajak secara berkala.

X3.7 : Pengetahuan dan pemahaman peraturan pajak terhadap wajib pajak perlu diberikan pembelajaran melalui training.

Hasil pengujian distribusi frekuensi jawaban variabel Pengetahuan dan Pemahaman Tentang Peraturan Perpajakan (X3) yang terdiri dari 7 butir pertanyaan didapatkan hasil bahwa mayoritas responden menjawab Setuju (S) pada butir pertanyaan yang diajukan. Hal ini menunjukkan bahwa mayoritas responden menyetujui butir pertanyaan pada variabel tersebut. Rata-rata tertinggi terdapat pada butir pertanyaan X3.5 yaitu Pengetahuan dan pemahaman peraturan pajak dapat diberikan kepada wajib pajak melalui sosialisasi, menunjukkan bahwa pertanyaan tersebut dinilai lebih oleh responden dalam menjelaskan variabel Pengetahuan dan Pemahaman Tentang Peraturan Perpajakan (X3).

Tabel 18. Hasil Distribusi Jawaban Responden Variabel Persepsi atas Efektifitas Sistem Perpajakan (X4)

Indikator	STS		TS		N		S		SS		Rata-rata
	Frek	%	Frek	%	Frek	%	Frek	%	Frek	%	
X4.1	2	4.0	4	8.0	5	10.0	29	58.0	10	20.0	3.82
X4.2	0	0.0	3	6.0	4	8.0	31	62.0	12	24.0	4.04
X4.3	0	0.0	3	6.0	6	12.0	25	50.0	16	32.0	4.08
X4.4	0	0.0	4	8.0	12	24.0	29	58.0	5	10.0	3.70
X4.5	0	0.0	3	6.0	5	10.0	33	66.0	9	18.0	3.96
X4.6	1	2.0	2	4.0	6	12.0	28	56.0	13	26.0	4.00
X4.7	0	0.0	0	0.0	6	12.0	32	64.0	12	24.0	4.12

Sumber: FNI Statistics

Keterangan:

X4.1 : Sistem Perpajakan Pelaporan serta Pengisian SPT dapat dilakukan wajib pajak melalui e-SPT dan *e-Filling*.

X4.2 : Proses pembayaran pajak yang sederhana serta tidak rumit membuat wajib pajak memiliki persepsi yang baik terhadap sistem perpajakan yang sudah diberikan.

X4.3 : Wajib pajak dapat melakukan penyampaian SPTnya dimana saja melalui drop box terdekat tanpa mendatangi ke Kantor Pelayanan Pajak Pratama, apabila wilayah domisilinya jauh dari tempat Kantor Pelayanan Pajak Pratamanya.

X4.4 : Wajib pajak mengetahui serta memahami atau mencari *update* terbaru tentang peraturan pajak terbaru secara online lewat internet.

X4.5 : Wajib pajak dapat melakukan pendaftaran NPWP melalui *e-register*, tanpa harus datang ke KPP Pratama.

X4.6 : Pembayaran pajak juga dapat dilakukan melalui *e-Banking*, untuk mempermudah wajib pajak dalam melakukan transaksi kredit untuk membayar pajaknya.

X4.7 : Sistem perpajakan yang dibuat oleh Direktorat Jenderal Pajak melalui Kantor Pelayanan Pajak Pratama, efektif dalam melayani untuk memberikan kemudahan terhadap wajib pajak dalam melakukan kewajibannya dalam membayar pajak.

Hasil pengujian distribusi frekuensi jawaban variabel Persepsi atas Efektifitas Sistem Perpajakan (X4) yang terdiri dari 7 butir pertanyaan didapatkan hasil bahwa mayoritas responden menjawab Setuju (S) pada butir pertanyaan yang diajukan. Hal ini menunjukkan bahwa mayoritas responden menyetujui butir pertanyaan pada variabel tersebut. Rata-rata tertinggi terdapat pada butir pertanyaan X4.7 yaitu Sistem perpajakan yang dibuat oleh Direktorat Jenderal Pajak melalui Kantor Pelayanan Pajak Pratama, efektif dalam melayani untuk memberikan kemudahan terhadap wajib pajak dalam melakukan kewajibannya dalam membayar pajak, menunjukkan bahwa pertanyaan tersebut dinilai lebih oleh responden dalam menjelaskan variabel Persepsi atas Efektifitas Sistem Perpajakan (X4).

Tabel 19. Hasil Distribusi Jawaban Responden Variabel Kemauan Membayar Pajak (Y)

Indikator	STS		TS		N		S		SS		Rata-rata
	Frek	%	Frek	%	Frek	%	Frek	%	Frek	%	
Y.1	0	0.0	1	2.0	6	12.0	37	74.0	6	12.0	3.96
Y.2	0	0.0	2	4.0	7	14.0	30	60.0	11	22.0	4.00
Y.3	0	0.0	0	0.0	5	10.0	35	70.0	10	20.0	4.10
Y.4	0	0.0	3	6.0	9	18.0	27	54.0	11	22.0	3.92
Y.5	0	0.0	1	2.0	8	16.0	33	66.0	8	16.0	3.96
Y.6	0	0.0	2	4.0	12	24.0	30	60.0	6	12.0	3.80
Y.7	0	0.0	1	2.0	8	16.0	26	52.0	15	30.0	4.10

Sumber: FNI Statistics

Keterangan:

Y.1 : Wajib pajak perlu melakukan konsultasi terlebih dahulu kepada fiskus sebelum melakukan pembayaran pajak.

Y.2 : Menyiapkan, memberikan serta menunjukkan dokumen yang diperlukan dalam membayar pajak kepada fiskus untuk dilakukan pendataan dan pemeriksaan.

Y.3 : Wajib pajak mengerti atas informasi yang diberikan fiskus mengenai batas waktu pembayaran pajak untuk dipahami, agar pembayaran pajak dapat dilakukan tepat pada waktu sudah ditentukan.

Y.4 : Wajib pajak diharapkan merelakan sejumlah nilai atau menyisihkan sejumlah uangnya untuk memenuhi kewajiban membayar pajak.

Y.5 : Mampu mengerti tentang informasi yang diberikan mengenai tata cara serta tempat pembayaran pajaknya.

Y.6 : Wajib pajak mampu membuat alokasi dana untuk menyisihkan sebagian dananya untuk membayar pajak.

Y.7 : Dengan kesadaran sendiri akan membuat wajib pajak mau membayar pajak karena merasa tidak dirugikan dari pemungutan pajak yang dilakukan.

Hasil pengujian distribusi frekuensi jawaban variabel Kemauan Membayar Pajak (Y) yang terdiri dari 7 butir pertanyaan didapatkan hasil bahwa mayoritas responden menjawab Setuju (S) pada butir pertanyaan yang diajukan. Hal ini menunjukkan bahwa mayoritas responden menyetujui butir pertanyaan pada variabel tersebut. Rata-rata tertinggi terdapat pada butir pertanyaan Y.3 yaitu Wajib pajak mengerti atas informasi yang diberikan fiskus mengenai batas waktu pembayaran pajak untuk dipahami, agar pembayaran pajak dapat dilakukan tepat pada waktu sudah ditentukan dan Y.7 yaitu Dengan kesadaran sendiri akan membuat wajib pajak mau membayar pajak karena merasa tidak dirugikan dari pemungutan pajak yang dilakukan, menunjukkan bahwa pertanyaan tersebut dinilai lebih oleh responden dalam menjelaskan variabel Kemauan Membayar Pajak (Y).

4. Regresi Linier Berganda

Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi berganda yaitu model regresi untuk menganalisis lebih dari satu variabel independen.

5. Pengujian Asumsi Klasik

Pengujian asumsi klasik digunakan sebagai syarat agar model regresi layak untuk digunakan. Asumsi yang digunakan antara lain normalitas, multikolinieritas, dan heterokedastisitas yang dijelaskan sebagai berikut:

(a). Uji Asumsi Normalitas Residual

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah residual dalam model path mengikuti sebaran normal atau tidak. Model path yang baik adalah model dimana residualnya mengikuti distribusi normal. Metode yang digunakan dalam menguji normalitas adalah dengan uji Kolmogorov-Smirnov. Residual model dikatakan mengikuti distribusi normal apabila nilai signifikansi uji lebih besar dari alpha yang digunakan. Hasil pengujian disajikan berikut ini.

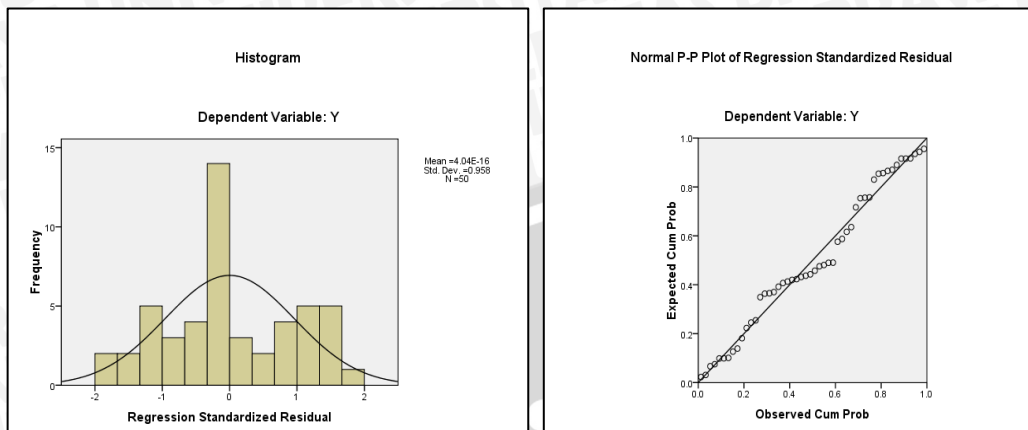
Tabel 20. Hasil Distribusi Jawaban Responden Variabel Y

Residual (Galat)	Signifikansi K-S	Keterangan
Model	0,580	Normal

Sumber: FNI Statistics

Asumsi normalitas menggunakan uji Kolmogorov-Smirnov yang ditunjukkan pada tabel di atas. Asumsi ini terpenuhi jika nilai signifikansi Kolmogorov-Smirnov residual model lebih besar dari alpha 5%. Dari hasil pengujian diperoleh nilai signifikansi Kolmogorov-Smirnov sebesar 0,580. Karena kedua nilai Kolmogorov-Smirnov lebih besar dari alpha 5% (0,050) maka dapat dikatakan bahwa asumsi normalitas terpenuhi.

Selain menggunakan metode Kolmogorov-Smirnov, pengujian asumsi normalitas dapat pula dilakukan dengan menggunakan gambar histogram dan normal p-p plot.



Gambar 4. Histogram dan Normal P-P Plot Uji Normalitas

Dari gambar 4. histogram menunjukkan pola yang mendekati bentuk bel dan plot linear memperlihatkan data yang bergerak mengikuti garis linear diagonal sehingga dapat disimpulkan bahwa data pada persamaan pertama berdistribusi normal dan memenuhi asumsi normalitas.

(b). Uji Asumsi Multikolinieritas

Uji multikolinieritas adalah pengujian dari asumsi yang terkait bahwa variabel bebas pada suatu model tidak saling berkorelasi satu dengan yang lainnya. Kolinieritas ganda terjadi apabila terdapat hubungan yang sempurna antara variabel bebas, sehingga sulit untuk memisahkan pengaruh tiap-tiap variabel secara individu terhadap variabel terikat. Pengertian dari asumsi ini adalah bahwa setiap variabel bebas (prediktor) hanya berpengaruh pada variabel respon, dan bukan pada variabel bebas lainnya. Pengujian multikolinieritas menggunakan nilai Variance Inflation Factor (VIF). Hipotesis pada asumsi ini yaitu :

H_0 : Terdapat multikolinieritas pada variabel bebas

H_1 : Tidak terdapat multikolinieritas pada variabel bebas

Pada regresi linier berganda, yang diharapkan adalah menolak hipotesis H_0 yaitu tidak terdapat hubungan linier antar variabel bebas.

Hipotesis H_0 ditolak apabila nilai VIF lebih kecil dari 10, begitu pula sebaliknya, apabila nilai VIF lebih besar dari 10, maka hipotesis H_0 diterima.

Tabel 21. Hasil Pengujian Multikolinieritas

Variabel Bebas	Toleransi	VIF	Keterangan
X_1	0,847	1,180	Bebas multikol
X_2	0,671	1,491	Bebas multikol
X_3	0,601	1,664	Bebas multikol
X_4	0,477	2,098	Bebas multikol

Sumber: FNI Statistics

Tabel 21. merupakan hasil pengujian non multikolinieritas dengan menggunakan Variance Inflation Factor (VIF). Nilai VIF pada X_1 (1,180), X_2 (1,491), X_3 (1,664), dan X_4 (2,098) lebih kecil dari 10, maka hipotesis H_0 ditolak yaitu tidak terdapat hubungan linier variabel antar variabel bebas atau dapat dikatakan bahwa asumsi multikolinieritas telah terpenuhi.

(c). Uji Asumsi Heterokedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varian dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika varian dari residual satu

pengamatan kepengamatan yang lain tetap, maka disebut homoskedastisitas dan jika berbeda akan disebut heteroskedastisitas. Model regresi yang baik adalah model yang tidak terjadi heteroskedastisitas (Ghozali, 2005). Metode yang dapat dipakai untuk mendeteksi gejala heterokedastisitas dalam penelitian ini adalah metode grafik.

Untuk mendeteksi ada atau tidaknya heteroskedastisitas di dalam model regresi dapat menggunakan beberapa cara, salah satunya dengan uji glejser. Dalam hasil pengujian dengan uji glajser ini, jika tidak ada satupun variabel independen yang signifikan secara statistik mempengaruhi variabel dependen nilai Absolut Ut (AbsUt), yang dapat dilihat dari probabilitas signifikannya di atas tingkat kepercayaan 5%, maka model regresi yang digunakan tidak mengandung heteroskedastisitas.

Tabel 22. Hasil Pengujian Heterokedastisitas

Variabel Bebas	t hitung	Signifikansi	Keterangan
X1	0,950	0,347	Bebas hetero
X2	1,908	0,063	Bebas hetero
X3	0,116	0,908	Bebas hetero
X4	1,062	0,294	Bebas hetero

Sumber: FNI Statistics

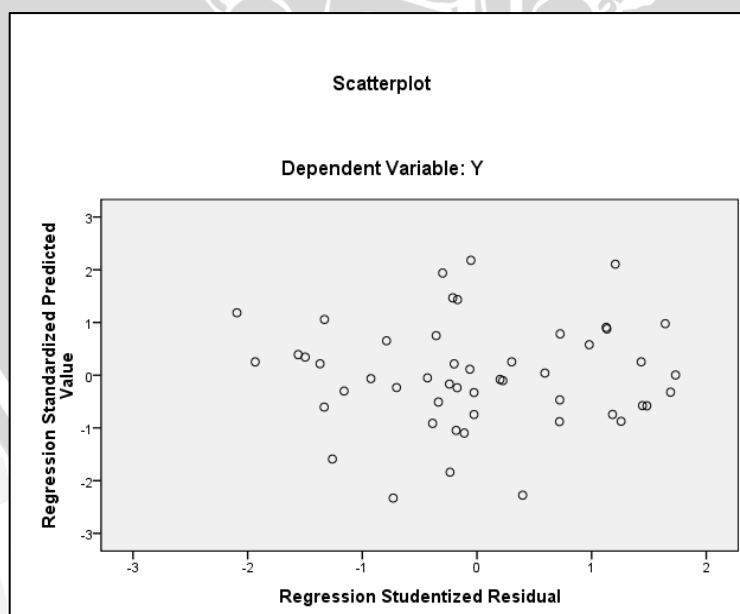
Tabel 22. merupakan hasil pengujian non heterokedastisitas dengan menggunakan metode Glejser. Nilai signifikansi pada X1 (0,347), X2 (0,063), X3 (0,908), dan X4 (0,294) lebih besar dari alpha

5%, maka hipotesis H_0 diterima yaitu bahwa asumsi heterokedastisitas telah terpenuhi.

Selain itu dapat dilihat dari grafik plot antara nilai prediksi variabel terikat (ZPRED) dengan residualnya (SRESID). Ada tidaknya gejala heteroskedastisitas dapat diketahui dengan dua hal, antara lain :

1. Jika pencaran data yang berupa titik-titik membentuk pola tertentu dan beraturan, maka terjadi masalah heteroskedastisitas.
2. Jika pencaran data yang berupa titik-titik tidak membentuk pola tertentu dan menyebar diatas dan dibawah sumbu Y, maka tidak terjadi masalah heteroskedastisitas.

Adapun grafik hasil pengujian heterokesdastisitas menggunakan SPSS versi 16.0 dapat dilihat pada Gambar di bawah ini:



Gambar 5. Scatterplot Uji Heterokedastisitas

Hasil analisis pada Gambar 5. di atas menunjukkan bahwa titik-titik menyebar secara acak dan tidak membentuk pola tertentu. Hal ini menunjukkan bahwa tidak terdapat indikasi adanya heterokedastisitas pada kedua model yang diuji sehingga asumsi ini terpenuhi.

6. Pengujian Hipotesis

Pengujian hipotesis dilakukan untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh dari variabel bebas terhadap variabel terikat baik secara simultan maupun secara parsial, dan untuk mengetahui besarnya pengaruh tersebut.

(a). Uji Hipotesis Simultan

Pengujian secara simultan dilakukan dengan menggunakan uji F. Pengujian ini dilakukan untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh dari seluruh variabel bebas terhadap variabel terikat. Hipotesis pada uji F yaitu :

H_0 : Seluruh variabel bebas tidak mempengaruhi variabel terikat secara simultan

H_1 : Seluruh variabel bebas mempengaruhi variabel terikat secara simultan

Ketentuan pengambilan keputusan untuk menguji hipotesis di atas adalah dengan membandingkan nilai F hitung dengan nilai F tabel, atau dapat pula dengan membandingkan nilai signifikansi (probabilitas) dengan batas tingkat kesalahan pengambilan keputusan (α) yang ditetapkan. Apabila nilai F hitung lebih besar dari nilai F

tabel atau nilai signifikansi lebih kecil dari alpha, maka keputusan yang diambil adalah menolak hipotesis H_0 , yaitu terdapat pengaruh secara simultan dari seluruh variabel bebas terhadap variabel terikat. Hasil pengujian secara simultan disajikan pada tabel 23 di bawah ini.

Tabel 23. Hasil Uji Hipotesis Simultan

Variabel bebas	Variabel terikat	F hitung	Sig. F	Keterangan
<i>X1, X2, X3, dan X4</i>	<i>Y</i>	20,758	0,000	Signifikan
R-square = 0,649				

$$F \text{ tabel} = F_{(4,45,5\%)} = 2,579$$

Pada tabel 23, nilai F hitung pada model pertama sebesar 20,758 dan nilai signifikansi sebesar 0,000. Karena nilai F hitung lebih besar dari nilai F tabel ($20,758 > 2,579$) atau nilai signifikansi lebih kecil dari alpha 5% ($0,000 < 0,050$), maka hipotesis H_0 ditolak dan dapat disimpulkan bahwa secara bersama-sama terdapat pengaruh yang nyata dari variabel Kesadaran Membayar Pajak (*X1*), Pelayanan Fiksus (*X2*), Pengetahuan dan Pemahaman Tentang Peraturan Perpajakan (*X3*), dan Persepsi atas Efektifitas Sistem Perpajakan (*X4*) terhadap variabel Kemauan Membayar Pajak (*Y*) dengan tingkat batas kesalahan 5%.

(b). Koefisien Determinasi

Koefisien determinasi (R^2) pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai koefisien determinasi antara nol dan satu. Nilai R^2 yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen amat terbatas. Nilai yang mendekati satu berarti variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variabel dependen.

Nilai koefisien determinasi (R^2) adalah sebesar 0,649, maka besarnya pengaruh total variabel Kesadaran Membayar Pajak ($X1$), Pelayanan Fiksus ($X2$), Pengetahuan dan Pemahaman Tentang Peraturan Perpajakan ($X3$), dan Persepsi atas Efektifitas Sistem Perpajakan ($X4$) terhadap variabel Kemauan Membayar Pajak (Y) adalah sebesar 0,649 atau sekitar 64,9%, dan sisanya sebesar 35,1% dipengaruhi oleh variabel lain di luar penelitian.

(c). Uji Hipotesis Parsial

Uji t adalah pengujian secara parsial untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh dari setiap variabel bebas (prediktor) terhadap variabel terikat (respon). Hipotesis pada uji t yaitu :

H_0 : Setiap variabel bebas tidak mempengaruhi variabel terikat

H_1 : Setiap variabel bebas mempengaruhi variabel terikat

Ketentuan pengambilan keputusan untuk menguji hipotesis di atas adalah dengan membandingkan nilai t hitung dengan nilai t tabel, atau dapat pula dengan membandingkan nilai signifikansi (probabilitas) dengan batas tingkat kesalahan pengambilan keputusan (α) yang ditetapkan. Apabila nilai t hitung (absolut) lebih besar dari nilai t tabel atau nilai signifikansi lebih kecil dari α , maka keputusan yang diambil adalah menolak hipotesis H_0 , yaitu terdapat pengaruh secara parsial dari setiap variabel bebas terhadap variabel terikat. Hasil pengujian secara parsial disajikan pada tabel di bawah ini.

Tabel 24. Hasil Uji Hipotesis Parsial

Variabel bebas	Koefisien	t hitung	Sig. t	Keterangan
<i>Konstanta</i>	1,542	0,502	0,618	Non Signifikan
<i>X1</i>	0,180	2,201	0,033	Signifikan
<i>X2</i>	0,205	2,043	0,047	Signifikan
<i>X3</i>	0,296	2,710	0,009	Signifikan
<i>X4</i>	0,261	2,412	0,020	Signifikan

t tabel = $t_{(45,5\%)} = 2,014$

(1). Pengaruh Kesadaran Membayar pajak (*X1*) terhadap Kemauan Membayar Pajak (*Y*)

Nilai t hitung yang didapatkan sebesar 2,201 dan nilai signifikansi sebesar 0,033. Karena nilai t hitung lebih besar dari t tabel ($2,201 > 2,014$) atau nilai signifikansi lebih kecil dari α 5%

($0,033 < 0,050$), maka hipotesis H_0 ditolak dan dapat dikatakan bahwa variabel Kesadaran membayar pajak (X_1) berpengaruh secara nyata pada variabel Kemauan membayar pajak (Y) pada taraf signifikansi 5%. Dapat dijelaskan 5% itu merupakan tingkat kesalahan dari kesimpulan, jadi variabel Kesadaran membayar pajak (X_1) berpengaruh signifikan terhadap Kemauan membayar pajak (Y) dengan resiko kesalahan 5%. Hal ini menunjukkan sikap wajib pajak tentang kesadaran terhadap perpajakan cukup baik. Artinya kesadaran wajib pajak cukup dimengerti bagaimana masyarakat yang memiliki kewajiban membayar pajak secara berkala bertujuan untuk perkembangan negara secara khususnya pembangunan masyarakat luas. Selain itu semakin tinggi tingkat kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak maka semakin tinggi pula tingkat kemauan membayar pajak. Hal ini perlu dipertahankan oleh pihak-pihak yang terkait agar para wajib pajak tetap sadar akan pajak dan mereka telah mempunyai pandangan positif terhadap pajak.

(2). Pengaruh Pelayanan Fiskus (X_2) terhadap Kemauan Membayar Pajak (Y)

Nilai t hitung yang didapatkan sebesar 2,043 dan nilai signifikansi sebesar 0,047. Karena nilai t hitung lebih besar dari t tabel ($2,043 > 2,014$) atau nilai signifikansi lebih kecil dari alpha 5% ($0,047 < 0,050$), maka hipotesis H_0 ditolak dan dapat dikatakan bahwa

variabel Pelayanan Fiskus (X_2) berpengaruh secara nyata pada variabel Kemauan membayar pajak (Y) pada taraf signifikansi 5%. Dapat dijelaskan 5% itu merupakan tingkat kesalahan dari kesimpulan, jadi variabel Pelayanan Fiskus (X_2) berpengaruh signifikan terhadap kemauan membayar pajak (Y) dengan resiko kesalahan 5%. Hal ini menunjukkan sikap wajib pajak cukup memiliki kepercayaan terhadap pelayanan yang telah dilakukan oleh fiskus, bahwa wajib pajak telah mendapatkan pelayanan yang cukup baik dari aparat pajak dengan selalu memperhatikan wajib pajak. Namun disamping itu, berdasarkan tabel 24 menunjukkan bahwa, pelayanan fiskus ini memiliki t hitung yang paling rendah, hal ini mengindikasikan bahwa, masih kurangnya pelayanan fiskus dalam melayani wajib pajak di KPP Pratama Singosari, penyebabnya yaitu kurangnya pegawai pajak, sehingga pelayanan di sana cukup lama dalam pelayanannya yang diberikan oleh fiskus. Oleh karena itu, pelayanan fiskus ini masih perlu ditingkatkan lagi dan harus tetap dijaga dan diperhatikan oleh Kantor Pajak maupun Dirjen Pajak. Pelayanan yang baik diupayakan dapat memberikan keamanan, kelancaran, dan kepastian hukum yang dapat dipertanggungjawabkan, sehingga diharapkan Ditjen Pajak dapat mengurangi kenakalan-kenakalan pajak yang dilakukan petugas kantor pelayanan pajak yang dapat membuat wajib pajak agar

memiliki kepercayaan kepada fiskus serta pelayanan yang baik kepada wajib pajak.

(3). Pengaruh Pengetahuan dan Pemahaman Tentang Peraturan Perpajakan (X3) terhadap Kemauan Membayar Pajak (Y)

Nilai t hitung yang didapatkan sebesar 2,710 dan nilai signifikansi sebesar 0,009. Karena nilai t hitung lebih besar dari t tabel ($2,710 > 2,014$) atau nilai signifikansi lebih kecil dari α 5% ($0,009 < 0,050$), maka hipotesis H_0 ditolak dan dapat dikatakan bahwa variabel Pengetahuan dan Pemahaman Tentang Peraturan Perpajakan (X3) berpengaruh secara nyata pada variabel Kemauan membayar pajak (Y) pada taraf signifikansi 5%. Dapat dijelaskan 5% itu merupakan tingkat kesalahan dari kesimpulan, jadi variabel Pengaruh Pengetahuan dan Pemahaman Tentang Peraturan Perpajakan (X3) berpengaruh signifikan terhadap Kemauan membayar pajak (Y) dengan resiko kesalahan 5%. Hal ini menunjukkan sebagian besar 50% memiliki pendidikan sarjana. Pendidikan wajib pajak tinggi, maka akan menimbulkan tingginya tingkat pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan perpajakan, sehingga pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan perpajakan pun cukup baik. Oleh karena itu, wajib pajak sadar tentang kemauan membayar pajaknya. Petugas pajak atau Dirjen Pajak agar lebih meningkatkan kembali pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan perpajakan kepada wajib pajak dengan cara sosialisasi dan

pelatihan lebih, agar menambah pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan perpajakan sehingga seluruh tingkat dari pendidikan mengerti, mengetahui dan memahami tentang peraturan perpajakan.

(4). Pengaruh Persepsi atas Efektifitas Sistem Perpajakan (X4) terhadap Kemauan Membayar Pajak (Y)

Nilai t hitung yang didapatkan sebesar 2,412 dan nilai signifikansi sebesar 0,020. Karena nilai t hitung lebih besar dari t tabel ($2,412 > 2,014$) atau nilai signifikansi lebih kecil dari alpha 5% ($0,020 < 0,050$), maka hipotesis H_0 ditolak dan dapat dikatakan bahwa variabel Persepsi atas Efektifitas Sistem Perpajakan (X4) berpengaruh secara nyata pada variabel Kemauan membayar pajak (Y) pada taraf signifikansi 5%. Dapat dijelaskan 5% itu merupakan tingkat kesalahan dari kesimpulan, jadi variabel Pengaruh Persepsi atas Efektifitas Sistem Perpajakan (X4) berpengaruh signifikan terhadap Kemauan membayar pajak (Y) dengan resiko kesalahan 5%. Hal ini menunjukkan bahwa menariknya atau diketahuinya oleh wajib pajak sistem perpajakan yang dibuat oleh Kantor Pajak atau Dirjen Pajak memiliki keefektifan dalam membantu dan meringankan wajib pajak dalam melapor dan membayar pajak. Persepsi atas Efektifitas Sistem Perpajakan cukup baik untuk wajib pajak agar memiliki kemauan membayar pajak. Diharapkan aparat pajak agar lebih memberikan penjelasan tentang sistem perpajakan,

agar wajib pajak lebih banyak mengetahui dan memahami tentang sistem perpajakan. Penggunaan sistem perpajakan diharapkan dapat membantu wajib pajak melapor dan membayar pajak.

7. Persamaan Regresi

Persamaan regresi yang dapat dibentuk dari tabel 24 adalah sebagai berikut:

$$Y = 1,542 + 0,180 X1 + 0,205 X2 + 0,296 X3 + 0,261 X4 + e$$

(a). Pengaruh Kesadaran Membayar pajak ($X1$) terhadap Kemauan Membayar Pajak (Y)

Besarnya koefisien 0,180 dan bertanda positif signifikan menyatakan bahwa setiap peningkatan skor $X1$ sebesar 1 satuan akan meningkatkan skor Y sebesar 0,180 atau dengan kata lain semakin meningkatnya faktor kesadaran membayar pajak ($X1$) akan meningkatkan pula faktor kemauan membayar pajak (Y).

(b). Pengaruh Pelayanan Fiskus ($X2$) terhadap Kemauan Membayar Pajak (Y)

Besarnya koefisien 0,205 dan bertanda positif signifikan menyatakan bahwa setiap peningkatan skor $X2$ sebesar 1 satuan akan meningkatkan skor Y sebesar 0,205 atau dengan kata lain semakin meningkatnya faktor Pelayanan Fiskus ($X2$) akan meningkatkan pula faktor Kemauan membayar pajak (Y).

(c). Pengaruh Pengetahuan dan Pemahaman Tentang Peraturan Perpajakan (X_3) terhadap Kemauan Membayar Pajak (Y)

Besarnya koefisien 0,296 dan bertanda positif signifikan menyatakan bahwa setiap peningkatan skor X_3 sebesar 1 satuan akan meningkatkan skor Y sebesar 0,296 atau dengan kata lain semakin meningkatnya faktor Pengaruh Pengetahuan dan Pemahaman Tentang Peraturan Perpajakan (X_3) akan meningkatkan pula faktor Kemauan Membayar Pajak (Y).

(d). Pengaruh Persepsi atas Efektifitas Sistem Perpajakan (X_4) terhadap Kemauan Membayar Pajak (Y)

Besarnya koefisien 0,261 dan bertanda positif signifikan menyatakan bahwa setiap peningkatan skor X_4 sebesar 1 satuan akan meningkatkan skor Y sebesar 0,261 atau dengan kata lain semakin meningkatnya faktor Persepsi atas Efektifitas Sistem Perpajakan (X_4) akan meningkatkan pula faktor Kemauan membayar pajak (Y).